

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KELAS UNGGULAN DAN PROGRAM AKSELERASI: PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Halimatussakdiah¹, Ranti Pratiwi², M. Rafli Aditya³, Abdurrahman⁴, Mujhirul Iman⁵
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan^{1,2,3,4}, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-
Hikmah Medan⁵

Email: tussakdiahhalima5@gmail.com¹, pratiwiranti53@gmail.com²,
rafliadityaaa@gmail.com³, rafliadityaaa@gmail.com⁴,
mujhiruliman@alhikmahmedan.ac.id⁵

ABSTRAK

Implementasi kelas unggulan dan program akselerasi masih memunculkan berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan layanan pendidikan, munculnya diskriminasi akademik, hingga perdebatan mengenai keadilan dalam akses pendidikan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan maupun keberterimaan kebijakan tersebut. Artikel ini bertujuan menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kebijakan penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam melalui pendekatan literature review. Analisis difokuskan pada aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dasar pertimbangan kebijakan, implementasi di sekolah, dampak yang ditimbulkan, serta kesesuaiannya dengan prinsip musyawarah, keadilan, amanah, kemaslahatan, dan akuntabilitas dalam Manajemen Pendidikan Islam. Hasil telaah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, penggunaan data yang objektif, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pendidikan yang berkeadilan. Dengan demikian, kebijakan kelas unggulan dan program akselerasi perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga pada pemerataan kesempatan belajar dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, Kebijakan Pendidikan, Kelas Unggulan, Program Akselerasi, Manajemen Pendidikan Islam.

ABSTRACT

The implementation of superior classes (honors classes) and acceleration programs continues to give rise to various issues, ranging from disparities in educational services and academic discrimination to concerns regarding equitable access to education. Consequently, the decision-making process during policy formulation is a critical factor determining both the success and the acceptance of such policies. This article analyzes the decision-making process regarding policies for superior classes and acceleration programs from the perspective of Islamic Educational Management, employing a literature review approach. The analysis focuses on the actors involved in decision-making, the rationale behind the policies, school-level implementation, the resulting impacts, and alignment with the Islamic Educational Management principles of consultation, trustworthiness, public interest, and accountability. The findings indicate that policy effectiveness is influenced not only by the quality of planning but also by the involvement of diverse stakeholders, the use of objective data, and the application of equitable educational governance principles. Therefore, policies concerning superior classes and acceleration programs should aim not merely to enhance academic achievement but also to ensure equal learning opportunities and the holistic development of students' potential.

Keywords: Decision-Making, Education Policy, Advanced Classes, Acceleration Program, Islamic

A. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak lagi hanya diarahkan pada pemerataan akses, tetapi juga pada penyediaan layanan pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman potensi peserta didik. Salah satu bentuk kebijakan yang berkembang di berbagai satuan pendidikan adalah penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi. Kedua program tersebut dirancang sebagai bentuk layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi agar memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik, minat, serta kecepatan belajarnya (Azkiyani et al., 2023).

Secara konseptual, kelas unggulan merupakan program pembelajaran yang menghimpun peserta didik dengan kemampuan akademik tertentu melalui proses seleksi dan diberikan layanan pendidikan yang lebih intensif dibandingkan kelas reguler. Sementara itu, program akselerasi memberikan kesempatan kepada peserta didik berbakat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengurangi capaian kompetensi yang telah ditetapkan. Kedua kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap kebutuhan diferensiasi layanan pendidikan sekaligus sebagai strategi peningkatan mutu sekolah melalui pengembangan potensi peserta didik secara optimal (Hardianti, 2020).

Di sisi lain, implementasi kelas unggulan dan program akselerasi masih menjadi perdebatan dalam dunia pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan prestasi belajar, motivasi akademik, serta citra sekolah di mata masyarakat. Pengelolaan kelas unggulan yang dirancang secara sistematis terbukti mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong pencapaian akademik peserta didik secara optimal (Wati & Trihantoyo, 2020).

Namun demikian, sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi dapat memunculkan persoalan baru berupa kesenjangan layanan pendidikan, segregasi peserta didik, serta munculnya stigma terhadap siswa di kelas reguler. Selain itu, beban belajar yang lebih tinggi pada program akselerasi berpotensi menimbulkan tekanan psikologis apabila tidak disertai dengan pendampingan yang memadai. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh kualitas proses pengambilan keputusan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan (Miswanto, 2025).

Dalam perspektif administrasi dan manajemen pendidikan, pengambilan keputusan merupakan inti dari keseluruhan proses penyelenggaraan organisasi pendidikan. Setiap kebijakan yang diterapkan di sekolah merupakan hasil dari serangkaian proses identifikasi masalah, analisis kebutuhan, penentuan alternatif kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Oleh karena itu, keputusan mengenai pembentukan kelas unggulan maupun program akselerasi seharusnya didasarkan pada kebutuhan nyata peserta didik, kesiapan sumber daya sekolah, kapasitas guru, serta mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin muncul. Pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada data dan kebutuhan riil berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang efektif bahkan menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan (Karoso, 2020).

Dalam konteks Manajemen Pendidikan Islam, proses pengambilan keputusan tidak hanya mempertimbangkan aspek efektivitas organisasi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai syariat dan etika kepemimpinan Islam. Prinsip musyawarah (syūrā) menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan agar setiap keputusan dihasilkan melalui partisipasi para pemangku kepentingan. Selain itu, prinsip keadilan ('adl) menghendaki agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang proporsional sesuai dengan kebutuhannya tanpa menimbulkan diskriminasi. Prinsip amanah, kemaslahatan (maṣlaḥah), dan akuntabilitas

juga menjadi dasar agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga sekolah serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. Dengan demikian, kebijakan kelas unggulan dan program akselerasi tidak cukup dinilai dari keberhasilannya meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dalam pendidikan Islam (Qomarudin, 2020).

Penelitian mengenai kelas unggulan maupun program akselerasi sebenarnya telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian Azkiyani, Wiyani, dan Sahnun (2020) lebih menitikberatkan pada praktik manajemen kelas unggulan di madrasah. Penelitian Wati dan Trihantoyo (2020) mengkaji strategi pengelolaan kelas unggulan dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Sementara itu, Nursanty, Lian, dan Kesumawati (2023) berfokus pada implementasi program akselerasi di madrasah aliyah. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai aspek implementasi, strategi pengelolaan, dan faktor pendukung pelaksanaan program (Azkiyani et al., 2020).

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek implementasi manajemen kelas, efektivitas pembelajaran, atau keberhasilan program dalam meningkatkan prestasi peserta didik. Penelitian yang secara khusus mengkaji proses pengambilan keputusan kebijakan penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam masih relatif terbatas. Padahal, proses pengambilan keputusan merupakan fondasi yang menentukan kualitas implementasi kebijakan sekaligus memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program tersebut. Keterbatasan kajian inilah yang menjadi ruang ilmiah untuk penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kebijakan penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi melalui perspektif Manajemen Pendidikan Islam. Analisis difokuskan pada tahapan pengambilan keputusan, aktor yang terlibat, dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, implementasi di sekolah, dampak yang ditimbulkan, serta relevansinya dengan prinsip musyawarah, keadilan, amanah, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih objektif, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Manajemen Pendidikan Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review (kajian pustaka). Metode ini dipilih untuk menganalisis secara komprehensif proses pengambilan keputusan dalam kebijakan penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi berdasarkan hasil penelitian, teori, regulasi, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Pendekatan literature review memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan konsep, implementasi kebijakan, serta berbagai permasalahan yang muncul tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Rizky et al., 2025).

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang berasal dari artikel jurnal nasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding, regulasi pemerintah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan, kelas unggulan, program akselerasi, dan Manajemen Pendidikan Islam. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal nasional terbitan tahun 2020–2025 yang memiliki Digital Object Identifier (DOI) atau identitas publikasi yang dapat diverifikasi. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Google Scholar, Garuda, SINTA, dan portal Open Journal System (OJS) berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui empat

tahap, yaitu identifikasi literatur, telaah isi artikel, pengelompokan berdasarkan tema, serta sintesis hasil penelitian. (Rizkya et al., 2025)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pengambilan Keputusan dalam Kebijakan Pendidikan

Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi fundamental dalam manajemen pendidikan karena setiap kebijakan yang diterapkan di sekolah pada dasarnya merupakan hasil dari serangkaian proses memilih alternatif tindakan yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah atau pengelola pendidikan tidak hanya menentukan arah penyelenggaraan program, tetapi juga memengaruhi kualitas layanan, efektivitas pembelajaran, kepuasan pemangku kepentingan, hingga mutu lulusan. Oleh sebab itu, proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara sistematis, rasional, berbasis data, dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin muncul setelah kebijakan diimplementasikan (Refika et al., 2021).

Dalam perspektif manajemen modern, pengambilan keputusan dipahami sebagai proses yang diawali dengan identifikasi masalah, analisis penyebab, penyusunan berbagai alternatif solusi, pemilihan alternatif terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi hasil pelaksanaan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang berkualitas tidak lahir secara spontan, melainkan melalui proses analisis yang mendalam terhadap kebutuhan organisasi dan lingkungan strategisnya. Dalam konteks pendidikan, setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek pedagogis, sosial, psikologis, ekonomi, serta regulasi yang berlaku agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta didik (Rizkya et al., 2025).

Kebijakan pendidikan sendiri merupakan seperangkat keputusan strategis yang dirumuskan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kebijakan tidak hanya berbentuk regulasi formal, tetapi juga mencakup berbagai keputusan operasional yang dibuat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun komite sekolah dalam mengelola proses pendidikan. Oleh karena itu, kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pengambilan keputusan yang mendasarinya. Apabila keputusan disusun secara partisipatif, berbasis kebutuhan, dan didukung oleh bukti empiris, maka peluang keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar. Sebaliknya, keputusan yang didasarkan pada kepentingan tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi riil sekolah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam implementasi (Refika et al., 2021).

B. Kebijakan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Kelas Unggulan dan Program Akselerasi

Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan strategis yang dirumuskan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan mutu pembelajaran, pemerataan layanan pendidikan, serta pengembangan potensi peserta didik. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan di sekolah harus disusun melalui proses pengambilan keputusan yang sistematis, mempertimbangkan kondisi internal sekolah, kebutuhan peserta didik, perkembangan lingkungan pendidikan, dan regulasi yang berlaku (Miftah et al., 2025). Dalam konteks pendidikan Indonesia, salah satu bentuk kebijakan yang berkembang adalah penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi.

Program kelas unggulan pada dasarnya merupakan pengelompokan peserta didik yang memiliki prestasi akademik, kemampuan berpikir, dan motivasi belajar tinggi ke dalam satu kelas yang memperoleh layanan pembelajaran lebih intensif. Pengelompokan tersebut

umumnya dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akademik, hasil tes potensi akademik, tes psikologi, maupun prestasi nonakademik yang relevan. Selain memperoleh kurikulum yang sama dengan kelas reguler, peserta didik pada kelas unggulan biasanya mendapatkan pengayaan materi, pembelajaran berbasis proyek, pendampingan akademik, serta fasilitas pembelajaran yang lebih memadai (Masduqi, A. 2021).

Sementara itu, program akselerasi merupakan bentuk pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual dan kecepatan belajar di atas rata-rata sehingga mereka dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengurangi pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik berbakat agar tidak mengalami kebosanan akibat pembelajaran yang berlangsung terlalu lambat dibandingkan dengan kemampuan belajarnya.

Secara filosofis, penyelenggaraan kelas unggulan maupun program akselerasi didasarkan pada prinsip bahwa pendidikan harus mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (*education according to individual differences*). Pendekatan ini sejalan dengan teori diferensiasi pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pendidikan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya bertugas menyelenggarakan pembelajaran secara merata, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta didik yang memiliki potensi luar biasa untuk berkembang secara optimal.

Namun demikian, kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai kritik. Salah satu kritik yang paling banyak disampaikan adalah munculnya kesenjangan antara peserta didik kelas unggulan dan kelas reguler. Pengelompokan berdasarkan kemampuan akademik sering kali menimbulkan persepsi bahwa peserta didik di kelas reguler memiliki kemampuan yang lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi motivasi belajar, rasa percaya diri, bahkan interaksi sosial antarpeserta didik. Selain itu, apabila sekolah lebih memfokuskan sumber daya terbaik pada kelas unggulan, maka prinsip pemerataan layanan pendidikan dapat terabaikan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur melalui peningkatan prestasi akademik, tetapi juga melalui kemampuannya menjaga keadilan dan inklusivitas dalam layanan pendidikan (Saputri et al., 2024).

C. Sintesis Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap
1	Azkiyani, Wiyani, & Sahnan (2023)	Manajemen kelas unggulan	Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan supervisi menentukan keberhasilan kelas unggulan. (e-Journal IAIN Kerinci)	Belum membahas proses pengambilan keputusan dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam.
2	Ja'far (2022)	Manajemen sekolah unggulan	Manajemen efektif menjadi faktor penting dalam mewujudkan sekolah unggulan. (EJournal UIID Alwa)	Tidak mengkaji aktor dan mekanisme pengambilan keputusan kebijakan.
3	Bukadin (2022)	Manajemen pembelajaran madrasah unggulan	Mutu pembelajaran meningkat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik. (ejournal.staialutsmani.ac.id)	Belum mengaitkan kebijakan dengan prinsip syūrā, keadilan, dan amanah.
4	Sabrifha dkk. (2023)	Prinsip Manajemen	Prinsip MPI berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum dan mutu	Belum diterapkan pada kebijakan kelas unggulan dan

No	Penulis	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap
		Pendidikan Islam	pendidikan. (Journal IICET)	akselerasi.
5	Selviani dkk. (2025)	Manajemen Pendidikan Islam dan mutu lulusan	Manajemen yang baik meningkatkan kualitas lulusan melalui tata kelola yang efektif. (E-Jurnal STKIP Pessel)	Belum membahas kebijakan diferensiasi layanan pendidikan.

D. Analisis Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Kelas Unggulan dan Program Akselerasi

Pengambilan keputusan merupakan inti dari penyelenggaraan kebijakan pendidikan karena menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan suatu program. Dalam konteks kelas unggulan dan program akselerasi, keputusan tidak hanya berkaitan dengan pembentukan program, tetapi juga mencakup penentuan tujuan, mekanisme seleksi peserta didik, penyediaan sumber daya, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi program. Oleh sebab itu, kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin sekolah bersama para pemangku kepentingan (Huliatunisa et al., 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang berhasil menyelenggarakan kelas unggulan umumnya tidak mengambil keputusan secara spontan ataupun sekadar mengikuti tren. Sebaliknya, keputusan diawali dengan analisis kebutuhan sekolah (needs assessment), identifikasi potensi peserta didik, evaluasi kapasitas guru, serta kesiapan sarana dan prasarana. Pendekatan tersebut membuat program yang diselenggarakan lebih sesuai dengan kondisi sekolah dan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Azkiyani et al., 2023)

1. Aktor yang Terlibat dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kelas unggulan seharusnya menggunakan pendekatan partisipatif. Kepala sekolah bertugas menetapkan arah kebijakan, menyusun visi program, serta memastikan seluruh sumber daya mendukung pelaksanaan kelas unggulan. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum berperan merancang kurikulum, mengatur distribusi beban belajar, dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Guru memberikan masukan mengenai kemampuan akademik, karakter, kesiapan psikologis, dan kebutuhan belajar siswa berdasarkan pengalaman pembelajaran sehari-hari. Di sisi lain, komite sekolah dan orang tua memberikan pertimbangan mengenai dukungan sosial, pembiayaan, serta keberterimaan kebijakan di lingkungan Masyarakat (Huliatunisa et al., 2023).

Keterlibatan berbagai aktor tersebut memiliki dua manfaat utama. Pertama, keputusan menjadi lebih kaya karena didasarkan pada berbagai perspektif. Kedua, implementasi kebijakan menjadi lebih mudah karena seluruh pihak merasa memiliki program yang telah dirumuskan bersama. Namun demikian, praktik di lapangan masih menunjukkan bahwa banyak sekolah menggunakan model keputusan yang bersifat sentralistik. Kepala sekolah sering kali menjadi pihak yang paling dominan sehingga aspirasi guru, orang tua, bahkan peserta didik belum sepenuhnya terakomodasi (Huliatunisa et al., 2023).

2. Dasar Pertimbangan dalam Pengambilan Keputusan

Keputusan mengenai pembentukan kelas unggulan dan program akselerasi seharusnya didasarkan pada beberapa pertimbangan yang saling berkaitan.

- 1) Pertimbangan akademik. Sekolah perlu mengidentifikasi jumlah peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi melalui nilai rapor, hasil asesmen diagnostik, tes potensi akademik, maupun hasil psikotes.
- 2) Pertimbangan psikologis. Peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual tinggi

belum tentu memiliki kesiapan emosional untuk mengikuti pembelajaran yang lebih cepat atau lebih kompleks.

- 3) Pertimbangan sumber daya sekolah. Sekolah perlu memastikan bahwa jumlah guru, kompetensi pendidik, fasilitas laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, serta dukungan teknologi telah memadai.
- 4) Pertimbangan regulasi. Seluruh kebijakan sekolah harus tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional mengenai pemerataan akses pendidikan, perlindungan hak peserta didik, dan peningkatan mutu pendidikan.

Penelitian mengenai manajemen kelas unggulan menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesiapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi secara terpadu. Artinya, keputusan tidak boleh berhenti pada pembentukan kelas unggulan, tetapi harus diikuti dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan (Azkiyani et al., 2023).

3. Implementasi Kebijakan di Sekolah

Setelah keputusan ditetapkan, sekolah memasuki tahap implementasi. Tahap ini menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan karena keputusan yang baik belum tentu menghasilkan program yang berhasil apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan.

Implementasi kelas unggulan umumnya diawali dengan proses seleksi peserta didik. Setelah itu sekolah menyusun kurikulum pengayaan, menetapkan guru yang memiliki kompetensi tinggi, menyediakan program pembinaan prestasi, dan melakukan monitoring secara berkala.

Hasil penelitian di beberapa madrasah menunjukkan bahwa pengelolaan kelas unggulan yang dilakukan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi mampu meningkatkan prestasi akademik peserta didik sekaligus memperkuat daya saing lembaga pendidikan. Selain peningkatan prestasi, program tersebut juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sehingga berdampak pada meningkatnya minat pendaftaran peserta didik baru (Mustarsyidah, 2022). Meskipun demikian, implementasi di berbagai sekolah masih menunjukkan variasi kualitas.

4. Dampak Positif Kebijakan

Apabila dirancang berdasarkan analisis kebutuhan yang tepat, kebijakan kelas unggulan dan program akselerasi mampu memberikan berbagai manfaat.

- 1) Meningkatkan prestasi akademik peserta didik melalui pembelajaran yang lebih menantang dan sesuai dengan kemampuan intelektual mereka.
- 2) Meningkatkan motivasi belajar karena peserta didik berada pada lingkungan yang memiliki budaya akademik tinggi.
- 3) Mendorong inovasi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan berpusat pada peserta didik.
- 4) Meningkatkan reputasi sekolah di mata masyarakat sehingga memperkuat daya saing lembaga pendidikan.
- 5) Memberikan ruang pengembangan bakat bagi peserta didik yang memiliki potensi luar biasa sehingga mereka dapat berkembang secara optimal tanpa terhambat oleh pembelajaran yang terlalu lambat (Mustarsyidah, 2022).

5. Dampak Negatif Kebijakan

Di samping berbagai manfaat tersebut, penyelenggaraan kelas unggulan juga menghadirkan sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi. Pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan akademik dapat memunculkan segregasi sosial di lingkungan sekolah. Peserta didik kelas reguler berpotensi merasa kurang dihargai sehingga motivasi belajarnya menurun. Sebaliknya, peserta didik kelas unggulan dapat mengalami tekanan psikologis akibat tuntutan mempertahankan prestasi akademik secara terus-menerus.

Selain itu, apabila sekolah mengalokasikan guru terbaik, fasilitas terbaik, dan program pembinaan terbaik hanya kepada kelas unggulan, maka akan muncul ketimpangan layanan pendidikan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pemerataan kesempatan belajar yang menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional.

Khusus pada program akselerasi, berbagai penelitian juga menunjukkan adanya tantangan berupa beban belajar yang lebih berat, penyesuaian sosial yang tidak selalu mudah, serta risiko kelelahan akademik (*academic burnout*) apabila peserta didik tidak memperoleh pendampingan psikologis yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan program akselerasi tidak cukup diukur melalui percepatan masa studi, tetapi juga melalui perkembangan sosial, emosional, dan karakter peserta didik (Miswanto, 2025).

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama penyelenggaraan kelas unggulan di Indonesia bukan terletak pada keberadaan program tersebut, melainkan pada kualitas proses pengambilan keputusan. Banyak sekolah masih menjadikan kelas unggulan sebagai strategi pemasaran pendidikan untuk meningkatkan citra lembaga. Akibatnya, indikator keberhasilan lebih berorientasi pada peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi akademik daripada pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik secara menyeluruh (Mustarsyidah, 2022).

Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam kebijakan kelas unggulan dan program akselerasi seharusnya mengadopsi pendekatan *evidence-based decision making*, yaitu keputusan yang disusun berdasarkan data empiris, analisis kebutuhan, evaluasi risiko, dan partisipasi para pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut akan menghasilkan kebijakan yang lebih objektif, efektif, dan berkeadilan sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai tanpa mengabaikan prinsip pemerataan kesempatan belajar (Huliatunisa, 2023).

E. Analisis Kebijakan Kelas Unggulan dan Program Akselerasi dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen Pendidikan Islam memandang bahwa setiap kebijakan pendidikan bukan hanya merupakan keputusan administratif, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup diukur melalui pencapaian indikator akademik, tetapi juga melalui sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, transparansi, dan tanggung jawab moral. Prinsip ini membedakan pengambilan keputusan dalam Manajemen Pendidikan Islam dengan pendekatan manajemen yang hanya berorientasi pada efisiensi organisasi (Bahri, S, 2022).

Dalam konteks penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi, pendekatan Manajemen Pendidikan Islam memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Kebijakan tidak hanya dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan mutu sekolah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara utuh (*insan kāmīl*) tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

1. Prinsip Musyawarah (*Syūrā*) dalam Pengambilan Keputusan : Musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa urusan bersama hendaknya diputuskan melalui musyawarah (Q.S. *Asy-Syūrā* [42]: 38). Dalam konteks manajemen pendidikan, prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan dirumuskan melalui dialog yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Penyelenggaraan kelas unggulan seharusnya tidak hanya merupakan keputusan kepala sekolah, tetapi merupakan hasil musyawarah antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas, yayasan (bagi sekolah swasta), serta perwakilan orang tua peserta didik. Melalui mekanisme tersebut, berbagai aspek dapat dipertimbangkan secara lebih objektif, mulai dari kesiapan sekolah, kebutuhan peserta didik, dampak sosial, hingga keberlanjutan program (Zainal Muttaqin, 2022).

2. Prinsip Keadilan (Al-'Adl) : Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada setiap peserta didik, melainkan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik masing-masing. Dari perspektif ini, keberadaan kelas unggulan sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan apabila penyelenggaraannya bertujuan memenuhi kebutuhan peserta didik berbakat melalui layanan pendidikan yang sesuai. Peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi memang membutuhkan tantangan belajar yang berbeda dibandingkan peserta didik lainnya. Namun demikian, prinsip keadilan juga menuntut agar keberadaan kelas unggulan tidak mengurangi kualitas layanan bagi peserta didik di kelas reguler. Seluruh peserta didik tetap berhak memperoleh guru yang kompeten, fasilitas pembelajaran yang memadai, layanan bimbingan konseling, serta kesempatan mengembangkan potensi sesuai kemampuan masing-masing (Ja'far, 2022).
3. Prinsip Amanah dalam Kepemimpinan Pendidikan : Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik. Prinsip amanah mengharuskan kepala sekolah mengambil keputusan berdasarkan data dan kebutuhan nyata, bukan semata-mata demi meningkatkan popularitas sekolah atau memenangkan persaingan antar lembaga pendidikan. Apabila kelas unggulan dibentuk hanya sebagai strategi pemasaran sekolah tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai amanah. Sebaliknya, apabila keputusan didasarkan pada analisis kebutuhan, evaluasi sumber daya, kesiapan guru, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan peserta didik, maka kepala sekolah telah menjalankan amanah kepemimpinannya secara profesional. (Maulida, 2022).
4. Prinsip Kemaslahatan (Maṣlaḥah) : Konsep maṣlaḥah menempatkan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama setiap kebijakan. Dalam penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi, prinsip ini menghendaki agar manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan oleh peserta didik yang mengikuti program tersebut, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan kelas unggulan tidak menjadi simbol eksklusivitas, melainkan menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Sebaliknya, apabila manfaat program hanya dirasakan oleh sekelompok kecil peserta didik, sedangkan kelas reguler justru mengalami penurunan kualitas layanan, maka tujuan kemaslahatan belum tercapai. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh manfaat dari inovasi yang dikembangkan sekolah (Mustarsyidah, 2022).
5. Prinsip Akuntabilitas : Akuntabilitas berarti setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, profesional, dan moral. Dalam penyelenggaraan kelas unggulan, prinsip ini menuntut adanya transparansi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Akuntabilitas juga mengharuskan sekolah melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Apabila ditemukan bahwa kelas unggulan justru memperlebar kesenjangan atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap mutu pendidikan, maka sekolah harus berani melakukan revisi bahkan menghentikan program tersebut. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, mempertahankan kebijakan yang tidak lagi memberikan manfaat bertentangan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan (Susanto, A., 2022).

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama penyelenggaraan kelas unggulan di Indonesia bukan terletak pada konsepnya, melainkan pada kualitas proses pengambilan keputusan. Banyak sekolah masih menjadikan kelas unggulan

sebagai strategi meningkatkan citra lembaga, sehingga keputusan lebih berorientasi pada daya saing dibandingkan pada kebutuhan peserta didik (Mustarsyidah, 2022).

Dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam, kebijakan yang demikian belum sepenuhnya memenuhi prinsip syūrā, 'adl, amanah, maṣlahah, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, model pengambilan keputusan yang direkomendasikan adalah evidence-based participatory decision making, yaitu keputusan yang:

1. didasarkan pada data objektif mengenai kebutuhan peserta didik dan kapasitas sekolah;
2. melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui musyawarah;
3. mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pemerataan layanan pendidikan;
4. dievaluasi secara berkala dengan indikator yang terukur; dan
5. diarahkan pada kemaslahatan seluruh warga sekolah.

Model tersebut tidak hanya relevan dengan teori manajemen pendidikan modern, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Manajemen Pendidikan Islam. Dengan demikian, kelas unggulan dan program akselerasi dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan tanpa mengorbankan nilai keadilan, inklusivitas, dan tanggung jawab sosial.

F. Implikasi Pengambilan Keputusan terhadap Mutu Pendidikan dan Pemerataan Layanan

Dalam perspektif manajemen pendidikan, mutu tidak hanya diukur dari tingginya prestasi akademik peserta didik, tetapi juga dari efektivitas proses pembelajaran, kepuasan pemangku kepentingan, pemerataan kesempatan belajar, serta keberlanjutan pengembangan organisasi pendidikan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan mengenai kelas unggulan harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan mutu (quality improvement) dan pemerataan layanan (educational equity) (Azkiyani et al., 2023).

1. Kontribusi terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan : Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelas unggulan mampu meningkatkan budaya akademik sekolah. (Azkiyani et al., 2023).
2. Tantangan terhadap Pemerataan Pendidikan : Meskipun memiliki berbagai keunggulan, kebijakan kelas unggulan juga menghadapi tantangan serius terkait pemerataan pendidikan. Akibatnya, terjadi ketimpangan kualitas layanan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pendidikan (Azkiyani et al., 2023). Dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam, kondisi tersebut perlu dikritisi karena setiap peserta didik memiliki hak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
3. Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Evidence-Based Decision Making) : Salah satu kelemahan yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan kelas unggulan di Indonesia adalah pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berbasis bukti (evidence-based decision making). Pada beberapa sekolah, pembentukan kelas unggulan lebih dipengaruhi oleh tuntutan persaingan antarlembaga daripada hasil analisis kebutuhan peserta didik dan kesiapan organisasi.
4. Model Pengambilan Keputusan yang Direkomendasikan : Berdasarkan sintesis teori dan hasil penelitian, artikel ini mengusulkan model pengambilan keputusan kebijakan kelas unggulan dan program akselerasi yang terdiri atas enam tahapan utama.
 - 1) Identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi potensi peserta didik, kesiapan sekolah, kebutuhan masyarakat, serta regulasi yang berlaku.
 - 2) Pengumpulan data, meliputi data akademik, psikologis, sosial, dan sumber daya organisasi
 - 3) Musyawarah, yaitu melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas, dan orang tua dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan.
 - 4) Penetapan keputusan, yaitu memilih alternatif yang paling sesuai berdasarkan prinsip

efektivitas, efisiensi, keadilan, dan kemaslahatan.

- 5) Implementasi, yakni melaksanakan program sesuai perencanaan dengan pembagian tugas yang jelas dan sistem monitoring yang berkesinambungan.
- 6) Evaluasi, yaitu mengukur keberhasilan program menggunakan indikator akademik, nonakademik, kepuasan pemangku kepentingan, serta dampaknya terhadap pemerataan layanan pendidikan.

G. KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi merupakan bentuk diferensiasi layanan pendidikan yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkemampuan akademik tinggi sekaligus meningkatkan mutu satuan pendidikan. Keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis melalui identifikasi masalah, analisis kebutuhan, pengumpulan data, penyusunan alternatif, penetapan kebijakan, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang berhasil mengelola kelas unggulan umumnya menerapkan perencanaan yang matang, melibatkan pemangku kepentingan, dan melakukan evaluasi secara berkala. Di sisi lain, keputusan yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif berpotensi menimbulkan ketimpangan layanan pendidikan, segregasi akademik, serta kesenjangan antarpeserta didik.

Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kelas unggulan dan program akselerasi harus berlandaskan pada prinsip musyawarah (syūrā), keadilan ('adl), amanah, kemaslahatan (maṣlaḥah), dan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga menjamin pemerataan kesempatan belajar dan keadilan bagi seluruh peserta didik. Berdasarkan sintesis teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama penyelenggaraan kelas unggulan di Indonesia terletak pada kualitas tata kelola dan proses pengambilan keputusan, bukan pada konsep program itu sendiri. Oleh karena itu, model evidence-based decision making yang memadukan analisis data, partisipasi pemangku kepentingan, evaluasi berkelanjutan, dan nilai-nilai Manajemen Pendidikan Islam direkomendasikan sebagai pendekatan yang mampu menghasilkan kebijakan pendidikan yang efektif, adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, S. (2020). Implementasi manajemen kelas dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Studia Manageria*, 2(2), 183–196. <https://doi.org/10.19109/studiamanageria.v2i2.4167>
- Anwar, A., Hermawansyah, H., & Junaidin, J. (2025). Inovasi manajemen kelas dan etos kerja guru PAI di era Kurikulum Merdeka. *JEMARI: Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri*, 3(1). <https://doi.org/10.47625/jemari.v3i1.901>
- Azkiyani, R. N., Wiyani, N. A., & Sahnan, A. (2020). Manajemen kelas unggulan di MTs Negeri 3 Pemalang. *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*, 4(2), 105–120. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v4i2.2264>
- Azkiyani, R. N., Wiyani, N. A., & Sahnan, A. (2023). Manajemen kelas unggulan di MTs Negeri 3 Pemalang. *Leader: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.32939/ljmpi.v1i1.2250>
- Hanifah, H., Yuliana, G., & Sholehudin, A. (2025). Islamic classroom management dalam membentuk karakter dan menciptakan lingkungan belajar kondusif: Sebuah kajian pustaka. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.1534>
- Hardianti, D., Fatkuroji, F., & Hasanah, S. (2020). Manajemen kurikulum kelas unggulan di MI Darul

- Ulum Wates Ngaliyan Semarang. *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, 1(1). <https://doi.org/10.21580/jawda.v1i1.2020.6721>
- Huliatunisa, Y., Nurlaelah, N., & Hasanah, I. R. (2023). Manajemen pengambilan keputusan dalam organisasi pendidikan. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2).
- Ja'far, Ja'far. 2022. "Efektivitas manajemen pendidikan sebagai upaya menuju sekolah unggulan". *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam* 1 (1):72-87. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v1i1.665>.
- Mustarsyidah, Zayyini Rusyda., S ugiyarManajemen Program Kelas Unggulan Untuk Meningkatkan Daya Saing MTsN 1 Dan MTsN 2 Ponorogo. (2022). *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management*, 2(02), 137-152. <https://doi.org/10.21154/excelencia.v2i02.1229>
- Nabila, S., & Rahmadi, F. P. (2024). Implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs Guppi Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13690>
- Rizqi, A. M., Nisviati, S., Sianturi, R., & Aprilianti, A. R. (2024). Manajemen pendidikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai strategi membangun perilaku belajar yang kondusif di sekolah. *JUPIN*. <https://doi.org/10.54082/jupin.1714>
- Susanto, A. . (2022). Evaluasi pembelajaran pendidikan agama islam berbasis information and communication technology (ict) dan implikasinya terhadap kualitas pendidikan. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 220–231. <https://doi.org/10.18592/moe.v8i2.12415>
- Ulfiana, N. H., & Al Rosid, M. H. (2024). Transformasi pendidikan: Menyiapkan calon guru melalui manajemen inovasi kelas unggulan madrasah diniyyah. *Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.51339/akademika.v6i2.2919>
- Wati, A. R. Z., & Trihantoyo, S. (2020). Strategi pengelolaan kelas unggulan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 5(1), 46–57. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v5n1.p46-57>
- Zufria, I., Hasugian, A. H., & Simanjuntak, S. (2020). Penentuan kelas unggulan berbasis decision support system dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). *MEANS (Media Informasi Analisa dan Sistem)*, 5(2). <https://doi.org/10.54367/means.v5i2.973>